

**PENGARUH PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA KINERJA MANAJER DAN  
PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN  
( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh :**

**SRI WAHYUNI  
B 200 050 215**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo, (2002), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Anggaran merupakan elemen penting bagi sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Untuk itu perlu adanya suatu sistem penyusunan anggaran yang dapat mendukung realisasi anggaran tersebut, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran.

Dalam penyusunan anggaran ada beberapa pihak yang terlibat mulai dari manajemen tingkat atas ke tingkat bawah. Untuk menghasilkan anggaran yang efektif, manajer membutuhkan kemampuan untuk memperkirakan masa depan dengan menggunakan anggaran yang partisipatif (Hermanto dalam Prasetyo, 2005). Partisipasi manajer menengah, dalam struktur pemerintah kabupaten dinamakan kepala bidang diharapkan akan mampu memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Partisipasi merupakan teknik manajemen yang efektif karena para kepala bagian dapat menerima dan melaksanakan secara penuh dan tanggung jawab atas anggaran yang disusun secara partisipatif cenderung lebih realistis.

Bukti empiris menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya mengenai pengaruh hubungan antara kinerja kepala bidang dan partisipasi penyusunan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Bass dan Lebuilt (1963); Schuler dan Kim (1976); Brownell (1982) dan McInnes (1986); dan Indriantoro(1998) mengemukakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kinerja manajer dan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Sementara hasil penelitian Milani (1975); dan Riyanto (1996) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara keduanya, sedangkan beberapa penelitian lain melaporkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bertolak belakang atau negatif (Sterdy,1960; Ryan dan Locke,1967).

Menurut penelitian Hopwood dan Govindarajan (2002), dalam Falikhatun (2005), ketidakkonsistenan dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut kemungkinan belum adanya kesatuan hasil-hasil penelitian anggaran dengan

kinerja manajerial tergantung faktor-faktor tertentu yang dikenal dengan variabel kontinjensi. Penggunaan pendekatan kontinjensi tersebut memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai faktor *moderating* atau *intervening* yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajer.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajer, pelimpahan wewenang sebagai variabel *moderating* di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Peneliti ingin mengetahui apakah dengan menggunakan teori yang sama dilakukan dengan Ryninta dan Zulfikar (2005) tetapi menggunakan sampel yang berbeda, dapat menghasilkan atau mendapat hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul PENGARUH PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP HUBUNGAN ANTARA KINERJA MANAJER DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo)

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajer?
2. Apakah pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajer?
3. Apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer (kepala bidang).
2. Untuk menganalisis pengaruh pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajer (kepala bidang).
3. Untuk menganalisis pengaruh interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajer (kepala bidang).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai partisipasi penyusunan anggaran.
2. Bagi pihak manajer (kepala bidang) diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sistem penyusunan anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja manajer (kepala bidang).

### **E. Sistematika Pembahasan**

Skipi ini terdiri dari beberapa bab yaitu

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, pada akhir bab akan disajikan sistematika pembahasan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian mengenai definisi anggaran, karakteristik, anggaran fungsi anggaran, jenis-jenis anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, proses penyusunan anggaran, kinerja manajer, pendekatan kontinjensi, hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajer, pelimpahan wewenang, hubungan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajer, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukurannya, instrument pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pelaksanaan penelitian, diskripsi data, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab yang terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian dan saran-saran pengembangan bagi penelitian.